

SKRIPSI



TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT DALAM KONFLIK DI SURIAH

OLEH:

PATRA KULU TANDIRERUNG

B 111 05 238

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PELANGGARAN HAM BERAT DALAM KONFLIK
DI SURIAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum

OLEH:

**PATRA KULU TANDIRERUNG
B 111 05 238**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

PENGESAHAN SKRIPS I
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PELANGGARAN HAM BERAT DALAM KONFLIK
DI SURIAH

Disusun dan diajukan oleh
PATRA KULU TANDIRERUNG
B 111 05 238

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof Dr. Alma Manuputty, S.H.,M.H.
NIP .19460312 196902 1 001

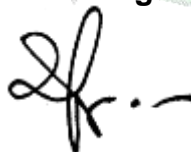
Sekretaris



Dr. Maasba Magassing, S.H.,M.H.
NIP. 19550803 198403 1 002

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 1003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

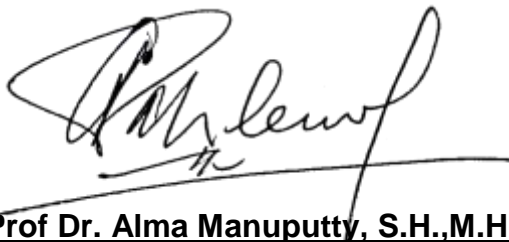
Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa

Nama : **PATRA KULU TANDIRERUNG**
NomorInduk : **B 111 05 238**
Bagian : **HUKUM INTERNASIONAL**
Judul : **TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PELANGGARAN HAM BERAT DALAM KONFLIK DI
SURIAH**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Seminar
Proposal.

Makassar, September 2012

Pembimbing I



Prof Dr. Alma Manuputty, S.H.,M.H.
NIP .19460312 196902 1 001

Pembimbing II



Dr. Maasba Magassing, S.H.,M.H.
NIP. 19550803 198403 1 002

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	8
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Sejarah Hak Asasi Manusia	10
1. Hak Asasi Manusia di Inggris	11
2. Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat	14
3. Hak Asasi Manusia di Prancis	16
4. Hak Asasi Manusia oleh PBB	17
B. Instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional	20
C. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat.....	24

1 Genosida (<i>Genocide</i>)	24
2 Kejahatan terhadap kemanusiaan (<i>Crimes against humanity</i>).....	24
3 Kejahatan Perang (<i>Crimes of war</i>)	26
4 Agresi (<i>Agression</i>)	26
D. Konflik Bersenjata Non-Internasional	27
E. <i>International Criminal Court</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Lokasi Penelitian	42
B. Jenis dan Sumber Data.....	42
C. Teknik Pengumpulan Bahan	43
D. Analisa Bahan.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Tinjauan Hukum Internasional terhadap Pelanggaran HAM Berat dalam Konflik di Suriah	45
B. Mekanisme untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat dalam konflik di Suriah	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekejaman Nazi terhadap tawanannya di kamp-kamp konsentrasi di Eropa dan kekejaman Jepang di wilayah-wilayah pendudukannya di Asia selama perang dunia II adalah contoh-contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menggugah hati nurani umat manusia. Peristiwa semacam ini walau dengan alasan apapun tetaplah tidak bisa dibenarkan. Berdasarkan atas argumen inilah akhirnya pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB memproklamkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM telah menjadi teks modern pertama tentang Hak Asasi Manusia yang dirancang pada awal kelahiran Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Dalam Mukadimah piagam PBB tersebut telah tampak kontra yang besar terhadap berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi sebelumnya. Dalam Mukadimah piagam tersebut diatur mulai dari hukum alam hingga martabat yang melekat dalam diri manusia dan hak-hak yang tak dapat dicabut dari padanya. Disebutkan pula bahwa penghinaan terhadap Hak Asasi Manusia sama dengan menghina hati nurani umat manusia. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia harus dilindungi oleh hukum.

Para Pelaku pelanggaran HAM haruslah dianggap sebagai musuh seluruh umat manusia. Pasal 28 dari DUHAM adalah salah satu pasal

yang resonansinya sangat kental bagi perlindungan HAM secara internasional sampai saat ini. Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial atau tatanan internasional dimana hak dan kebebasan yang diatur dalam DUHAM dapat direalisasikan. Batas wilayah kedaulatan seharusnya tidak bisa menjadi halangan bagi penegakan HAM yang universal, sehingga Bab VII dari piagam PBB memberikan kewenangan bagi dewan keamanan PBB untuk melakukan intervensi terhadap kedaulatan negara dimana terjadi pelanggaran HAM yang dapat mengancam perdamaian dunia.

DUHAM diproklamirkan oleh Majelis Umum PBB sebagai standar umum pencapaian bagi semua orang dan semua bangsa, sehingga DUHAM harus dipromosikan melalui pendidikan dan upaya-upaya progresif secara nasional dan internasional untuk menjamin pengakuan dan kepatuhan universal dan efektif.

Hak asasi manusia yang telah diakui secara universal, idealnya haruslah dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, baik negara, organisasi internasional antar pemerintah, organisasi internasional non pemerintah, orang perorangan baik individu maupun kolektif. Hanya dengan penghormatan dan perlindungan yang optimal, maka Hak Asasi Manusia benar-benar dapat ditegakkan dalam kehidupan nyata masyarakat baik nasional maupun internasional.

Dalam hukum internasional, sebuah negara dianggap melakukan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (*gross violation of human rights*) apabila:

1. Negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak asasi warganya. Atau
2. Negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya atau justru melakukan melalui aparat-aparatnya tindakan kejahatan internasional (*international crime*) atau kejahatan serius (*serious crime*) berupa kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan genosida (*crimes of genocide*), kejahatan perang (*crimes of war*) dan atau kejahatan agresi (*agression*).

Berdasarkan 2 poin di atas maka secara teoritis dapat disimpulkan bahwa setiap subyek hukum yang berkewajiban untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia, berpotensi pula untuk melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Peristiwa pelanggaran HAM dapat terjadi di mana saja di muka bumi ini, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Hal itu dilakukan oleh negara melalui aparat-aparatnya, oleh individu ataupun kolaborasi antara keduanya. Sejarah telah mencatat tentang pelanggaran HAM oleh negara, dimana kebanyakan pelanggaran HAM justru dilakukan oleh negara, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparatnya terhadap warga negaranya

sendiri maupun warga negara lain, dan juga secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan baik di tingkatan nasional maupun internasional yang berdampak pada tidak dipenuhinya hak-hak asasi warga negaranya sendiri atau hak-hak asasi warga negara lain.

Sebagai contoh empiris dari teori di atas yang terjadi dewasa ini adalah konflik di Negara Suriah, yang kemudian penulis pilih sebagai judul untuk penulisan skripsi ini. Adapun posisi kasusnya secara garis besar adalah sebagai berikut:

Kerusuhan di Suriah dimulai di kota selatan Deraa pada bulan Maret 2011 ketika penduduk lokal berkumpul untuk menyerukan tuntutan pembebasan 14 mahasiswa yang ditangkap dan dilaporkan disiksa oleh pasukan keamanan Suriah setelah menulis di dinding, slogan terkenal dari pemberontakan rakyat di Tunisia dan Mesir: "Orang-orang ingin kejatuhan rezim". Para demonstran juga menyerukan demokrasi dan kebebasan yang lebih besar.

Aksi ini awalnya berjalan damai walau pun diikuti oleh begitu banyak demonstran dan berkeliling kota setelah sholat Jumat. Aksi ini diadakan pada tanggal 18 Maret, namun justru disambut oleh pasukan keamanan dengan melepaskan tembakan yang menewaskan 4 (empat) orang. Hari berikutnya, mereka menembaki pelayat di pemakaman korban. Dalam hitungan hari, kerusuhan di Deraa telah berputar di luar kendali pemerintah setempat. Pada akhir Maret, tentara dengan

kendaraan lapis baja di bawah komando Maher al Assad¹ diturunkan ke kerumunan para pengunjuk rasa. Puluhan orang tewas, ketika tank menembaki kawasan pemukiman dan pasukan menyerbu rumah serta menangkap warga yang dianggap demonstran. Rangkaian tindakan represif aparat justru itu gagal menghentikan kerusuhan di Deraa, namun justru memicu protes anti-pemerintah di kota-kota lain di Suriah, di antaranya Baniyas, Homs, Hama dan pinggiran kota Damaskus. Tentara kemudian mengepung mereka yang dianggap sebagai penyebab kerusuhan. Pada pertengahan Mei, jumlah korban tewas telah mencapai 1.000 orang.

Pergolakan politik di Suriah telah berlangsung lebih dari satu tahun serta menimbulkan berbagai macam konflik dan perang saudara diantara sesama warga Suriah, dan diantara pihak oposisi Suriah dengan pihak militer dan pemerintah di bawah pimpinan Presiden Bashar Al-Assad. Serangkaian tindakan kekerasan fisik maupun mental juga terjadi di Suriah dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini, mulai dari pembunuhan, pengeboman, penculikan, penembakan, pemerkosaan, penyiksaan dan lain sebagainya. Namun di tengah-tengah situasi sosial-politik yang terus memburuk di Suriah, Presiden Bashar Al-Assad ternyata masih dapat mempertahankan rezim kekuasaannya karena dukungan dari pihak militer dan aparat birokrasi pemerintah yang masih loyal dan cukup kuat.

¹ Maher Al Assad adalah adik presiden Bashar Al Assad yang juga merupakan seorang petinggi Militer Suriah

Selama terjadi pergolakan politik, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat lebih dari 29.000 warga Suriah tewas dalam setahun terakhir. Ini belum termasuk korban tewas dari tentara maupun polisi pemerintah². Bahkan warga Suriah yang tidak tahan melihat negerinya terkoyak dan menginginkan kehidupan yang lebih baik justru memilih kabur ke luar negeri seperti Lebanon dan Turki.³ Mereka memilih meninggalkan tanah air mereka, sementara warga yang bertahan harus beradaptasi dengan teror, desing peluru, darah, ledakan bom, penculikan, pembunuhan dan kekejian lainnya.

Situasi keamanan Suriah yang semakin memburuk dan telah menyebabkan terjadinya tragedi kemanusiaan itu kemudian disoroti oleh dunia internasional, bahkan oleh Negara-negara yang selama ini dikenal memiliki hubungan yang sangat baik dengan Suriah seperti Russia, China, dan Iran juga mulai menekan pemerintah Suriah untuk tidak bertindak represif dan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga negaranya sendiri.

Di lain pihak, dunia internasional juga terus berikhtiar untuk mengupayakan perdamaian atau meminimalisir gencatan senjata diantara faksi-faksi yang berkonflik di Suriah, dan antara pihak oposisi dengan pihak pemerintah yang dilindungi oleh militer. Mantan Sekretaris Jenderal PBB yang kini bertugas sebagai Utusan Khusus PBB untuk Liga Arab,

² <http://www.jakarta-media.com/korban-perang-suriah-29-000-jiwa.html> diakses pada tanggal 1 August 2012, pukul 03:08 wita

³ <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/24/115443837/Jumlah-Pengungsi-Suriah-Hampir-Setengah-Juta> diakses pada tanggal 3 Agustus 2012, pukul 10: 24 wita

Kofi Annan, Senin tiba di Doha, Qatar, untuk bertemu dengan Emir Qatar, Sheikh Hamed bin Khalifa al-Thani, dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Qatar, Sheikh Hamd bin Jasim al-Thani. Dalam pertemuan tersebut, Kofi Annan menjelaskan bahwa pembicaraannya dengan Presiden Assad terfokus pada penghentian aksi kekerasan, perizinan untuk akses bantuan kemanusiaan, dan membuka dialog politik. Namun ia juga mengakui bahwa misinya belum meraih kemajuan untuk mengakhiri krisis Suriah dalam dua kali pertemuan dengan Presiden Assad di Damaskus.

Upaya-upaya untuk menghentikan kekerasan fisik yang terjadi di Suriah oleh pihak-pihak internasional, khususnya PBB dan Liga Arab, tampaknya masih menghadapi jalan terjal dan panjang akibat belum dicapainya kesepakatan damai atau gencatan senjata antara pihak pemerintah yang didukung militer dengan faksi-faksi oposisi bersenjata Suriah. Apalagi diduga kuat bahwa terdapat kelompok-kelompok teroris, ekstrimis, dan radikal yang ikut mengambil peran dalam kerusuhan dan bentrokan di Suriah dalam kurun waktu setahun ini. Namun upaya-upaya Liga Arab (khususnya Qatar) dan PBB (Kofi Annan) untuk secara serius berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik di Suriah patut didukung dan disukseskan oleh semua pihak.

Rezim Suriah selalu menegaskan bahwa mereka tidak menghadapi kubu oposisi, tetapi sekelompok teroris yang sedang membuat kacau negara. Rezim ini juga curiga bahwa aksi protes di Suriah didalangi oleh pihak Barat. Sedangkan Dewan Nasional Suriah (Suriah National Council/

SNC)⁴ telah meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera menggelar sidang dengan tujuan membahas pembantaian yang menewaskan 60 orang di kota Homs oleh pasukan Pemerintah Suriah. Bentrok senjata juga terjadi antara pasukan pemerintah dengan Tentara Pembebasan Suriah (FSA)⁵, pasukan oposisi, juga mulai menjalar ke Damaskus. Akibatnya korban tewas yang ditemukan pada hari Minggu lalu berjumlah 80 orang yang sebagian besar berada di kota Idlib, 60 jenazah yang sebagian terdiri dari perempuan dan anak-anak juga ditemukan di Distrik Al-Adawiyah di kota Homs.

Perbedaan pendapat yang sangat tajam antara rezim Suriah di bawah pimpinan Presiden Bashar al-Assad dengan pihak oposisi yang tergabung dalam Dewan Nasional Suriah/SNC telah menyebabkan terjadinya pertumpahan darah dan tragedi kemanusiaan paling menyedihkan dalam sejarah Suriah sepanjang abad ke 21 ini. Tuntutan mundur dari pihak oposisi kepada Presiden Assad pun hingga saat ini masih belum dapat dipenuhi akibat masih kuatnya dukungan pihak militer dan birokrasi terhadap rezim Assad. Dengan dalih menumpas kelompok teroris, pihak militer pun bertindak represif dan keras terhadap faksi-faksi oposisi Suriah. Sementara pertempuran terus berlangsung antara pihak pemerintah dan kubu oposisi, rakyat Suriah yang tidak berdosa dan tidak mengerti persoalan justru banyak yang menjadi korban, baik yang mengungsi ke luar negeri maupun yang tewas akibat perang tersebut.

⁴ Syria National Council

⁵ Free Syrian Army

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Internasional terhadap Pelanggaran HAM berat dalam konflik di Suriah ?
2. Bagaimana mekanisme untuk mengadili Pelaku Pelanggaran HAM berat dalam konflik di Suriah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Internasional terhadap Pelanggaran HAM berat dalam konflik di Suriah
2. Untuk mengetahui Mekanisme untuk mengadili Pelaku Pelanggaran HAM berat dalam konflik di Suriah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian :

1. Mengetahui Tinjauan Hukum Internasional terhadap Pelanggaran HAM berat dalam konflik di Suriah
2. Mengetahui Mekanisme untuk mengadili Pelaku Pelanggaran HAM berat dalam konflik di Suriah
3. Sebagai referensi untuk penelitian serupa di kemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Sejarah Hak Asasi Manusia

Kepedulian internasional terhadap Hak Asasi Manusia merupakan gejala yang relatif baru. Meskipun kita dapat menunjuk pada sejumlah traktat atau perjanjian internasional yang mempengaruhi isu kemanusiaan sebelum Perang Dunia II, baru setelah dimasukkan dalam Piagam PBB pada tahun 1945, kita dapat berbicara mengenai adanya perlindungan HAM yang sistematis dalam sistem internasional. Namun jelas bahwa upaya domestik untuk menjamin perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang dari aparat negara, mendahului perlindungan internasional terhadap HAM. Upaya-upaya domestik itu mempunyai sejarah yang panjang dan mulia, yang berkaitan erat dengan kegiatan revolusioner yang bertujuan menegakkan sistem konstitusional yang berdasarkan pada legitimasi demokrasi dan *Rule of Law*.

“Meskipun beberapa pakar menyatakan dapat merunut konsep HAM yang sederhana sampai pada filsafat Stoika di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati/ natural law Grotius dan ius naturale dari undang-undang Romawi, tampak jelas bahwa asal-usul konsep HAM yang modern dapat dijumpai dalam revolusi Inggris, revolusi Amerika dan revolusi Prancis pada abad XVII dan XVIII.”⁶

⁶ Scott Davidson; Human Rights, Open University Press Buckingham 1993, hal 2.

1. Hak Asasi Manusia di Inggris

Inggris sering disebut–sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Magna Charta*

Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang–wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut *Magna Charta* atau Piagam Agung.

Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan Hak Asasi Manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam *Magna Charta* itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya

perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.

Isi *Magna Charta* adalah sebagai berikut :

- Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
- Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut :
- Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
- Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
- Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
- Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

b. Petition of Rights

Pada dasarnya *Petition of Rights* berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut :

- Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
- Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.
- Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

c. *Habeas Corpus Act*

Habeas Corpus Act adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah sebagai berikut :

- Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan.
- Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

d. *Bill of Rights*

Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang :

- Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
- Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
- Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.

- Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing .
- Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

2. Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat

Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan dan milik (*life, liberty, and property*) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak – hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan *Declaration of Independence of the United States*.

Revolusi Amerika dengan *Declaration of Independence*-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak – Hak Asasi Manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.

John Locke menggambarkan keadaan status naturalis, ketika manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama, hidup lebih maju seperti yang disebut dengan status civilis, Locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara.

Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-Hak Asasi Manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai “pendekar” Hak Asasi Manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter.

Amanat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni :

- Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*).
- Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (*freedom of religion*).
- Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*).
- Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*).

Kebebasan- kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah totalitarisme Hitler (Jerman), Jepang, dan Italia. Kebebasan – kebebasan tersebut juga merupakan hak (kebebasan) bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang abadi. Empat kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang penyangga hak-Hak Asasi Manusia yang paling pokok dan mendasar.

3. Hak Asasi Manusia di Prancis

Perjuangan Hak Asasi Manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan *Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen* yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (*liberte, egalite, fraternite*).

Lafayette merupakan pelopor penegakan Hak Asasi Manusia masyarakat Prancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan *tersusunnya Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen*. Kemudian di tahun 1791, semua hak-Hak Asasi Manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. revolusi ini diprakarsai pemikir – pemikir besar seperti : J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. Hak Asasi yang tersimpul dalam deklarasi itu antara lain :

- Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.
- Manusia mempunyai hak yang sama.
- Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain.
- Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum.

- Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang.
- Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
- Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.
- Adanya kemerdekaan surat kabar.
- Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat.
- Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
- Adanya kemerdekaan bekerja, berdagang, dan melaksanakan kerajinan.
- Adanya kemerdekaan rumah tangga.
- Adanya kemerdekaan hak milik.
- Adanya kemerdekaan lalu lintas.
- Adanya hak hidup dan mencari nafkah.

4. Hak Asasi Manusia oleh PBB

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan Piagam Hak-Hak Asasi Manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi Hak Asasi Manusia (*Commission of Human Right*). Sidangnya dimulai pada bulan Januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakili dalam Sidang Umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

Universal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan, bahwa setiap orang mempunyai Hak :

- Hidup
- Kemerdekaan dan keamanan badan
- Diakui kepribadiannya
- Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
- Masuk dan keluar wilayah suatu Negara
- Mendapatkan Suaka
- Mendapatkan status kenegaraan/kebangsaan
- Mendapatkan hak milik atas benda
- Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
- Bebas memeluk agama
- Mengeluarkan pendapat
- Mengadakan rapat dan berkumpul

- Mendapat jaminan sosial
- Mendapatkan pekerjaan
- Berdagang
- Mendapatkan pendidikan
- Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
- Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.⁷

Majelis umum memproklamirkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pemenuhan hak-hak dan kebebasan- kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya.

B. Instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional

Meskipun DUHAM telah diterima tetapi karena sifatnya sebagai deklarasi, maka tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sehingga tujuan deklarasi sebagai pengakuan martabat manusia sulit diwujudkan, Untuk itu supaya tujuan DUHAM, dapat menjadi kenyataan diperlukan alat/instrumen HAM internasional. Instrumen HAM internasional merupakan alat yang berupa standar- tandar pembatasan pelaksanaan dan mekanisme kontrol terhadap kesepakatan kesepakatan antar negara tentang jaminan HAM yang instrument hukum internasional

⁷ Lihat DUHAM

HAM (*International Bill of Right*). Instrumen hukum internasional HAM tersebut bentuknya berupa kovenan (perjanjian) dan protokol, Kovenan, yaitu perjanjian yang mengikat bagi Negara - negara yang menandatanganinya. Istilah *covenant* (kovenan) digunakan bersamaan dengan *treaty* (kesepakatan) dan *convention* (konvensi/perjanjian). Sedangkan protokol merupakan kesepakatan dari negara - negara penandatangannya yang memiliki fungsi untuk lebih lanjut mencapai tujuan-tujuan suatu kovenan.

Ketika Majelis Umum PBB mengadopsi atau menyetujui sebuah konvensi atau protokol, maka terciptalah standar internasional, dan negara-negara yang meratifikasi konvensi itu berjanji Untuk menegakkannya. Ada sekitar 30 kovenan yang telah diratifikasi sejak DUHAM dideklarasikan 50 tahun yang lalu. Pemerintah yang melanggar standar yang telah ditentukan konvensi kemudian dapat digugat oleh PBB. Berbagai instrumen HAM yang berlaku secara internasional, diantaranya:

- a. Kovenan International tentang hak - hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*The International Covenant on Economic, Social and Cultue Rights*), Kovenan ini lahir pada tahun 1966, diadopsi pada 16 Desember 1975, dan berlaku pada 3 Januari 1976. Kovenan ini mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak ekonomi, sosial dan budaya mencakup:
 - 1) hak atas pekerjaan,

- 2) hak untuk membentuk serikat kerja,
- 3) hak atas pensiun, hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang layak,
- 4) hak atas pendidikan.

b. Kovenan Internasional tentang Hak - hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*).

Kovenan ini lahir tahun 1966, diadopsi pada 16 Desember 1975 dan berlaku pada 23 Maret pada 1976. Hak - hak sipil dan politik yang dijamin dalam kovenan ini yaitu :

- 1) hak atas hidup,
- 2) hak atas kebebasan dan keamanan diri
- 3) hak atas keamanan di muka badan - badan peradilan,
- 4) hak atas kebebasan berpikir, mempunyai keyakinan, beragama,
- 5) hak berpendapat tanpa mengalami gangguan,
- 6) hak atas kebebasan berkumpul secara damai,
- 7) hak untuk berserikat.

c. Protokol Opsional pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Protokol opsional ini, diadopsi pada 16 Desember 1975, dan berlaku pada 23 Maret 1976. Protokol Opsional/pilihan berisikan pemberian tugas pada komisi Hak-Hak Asasi. Manusia untuk menerima dan mempertimbangkan pengaduan dari individu - individu warga dalam wilayah

kekuasaan negara peserta Kovenan yang menjadi peserta Protokol, yang mengaku telah menjadi korban pelanggaran terhadap salah satu hak yang dikemukakan dalam Kovenan Hak -hak Sipil dan Politik. Pengaduan itu dapat diajukan secara tertulis kepada Komisi Hak Asasi Manusia, setelah semua Upaya domestik (dalam negara warga yang bersangkutan) yang tersedia telah di tempuhnya, tetapi tidak menampakkan hasil

- d. Protokol Opsional Kedua terhadap Kovenan Internasional tentang hak - hak Sipil dan Politik dengan tujuan Penghapusan hukuman Mati.(Protokol ini diadopsi pada 15 Desember 1989, dan berlaku pada 11 Juli 1991).
- e. Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) Konvensi ini mulai berlaku tahun 1981. Dokumen ini merupakan alat hukum yang paling lengkap (komprehensif) berkenaan dengan hak - hak asasi wanita, dan mencakup peranan dan status mereka. Dengan demikian dokumen ini merupakan dasar untuk menjamin persamaan wanita di negara-negara yang meratifikasinya.
- f. Konvensi Internasional penghapusan terhadap Semua bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*)

g. Konvensi Hak – hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Konvensi ini disepakati Majelis Umum PBB dalam sidangnya ke 44 pada Desember 1989. Menurut konvensi ini pengertian anak yakni setiap orang yang masih berumur di bawah 18 tahun. Kecuali jika berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak menentukan batas umur yang lebih rendah dari 18 tahun. Konvensi ini dicetuskan karena ternyata di berbagai belahan dunia. Meskipun telah di deklarasikan DUHAM yang juga melindungi harkat anak-anak sebagai manusi, ternyata belum dilaksanakan dengan baik. Banyak anak dipekerjakan di bawah umur, di kirim ke medan perang, diperkosa, dan Perlakuan,anak sebagai manusia sepenuhnya masih diabaikan. Misalnya, anak - anak tidak pernah didengar suara dan pandangan mereka, ketika menetapkan suatu kebijakan publik maupun kebijakan yang menyangkut anak sendiri. Padahal mereka akan terkena akibat atau akan merasakan dari setiap kebijakan publik yang diambil.

C. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat

Pelanggaran HAM berat (*The most serious crime/ Gross violation of human rights*) dalam hukum internasional diatur dalam International Criminal Court. Menurut pasal 5 ICC dikenal empat(4) jenis pelanggaran HAM berat, yaitu:

1. Genosida (*Genocide*)

Menurut pasal 6 ICC Genosida adalah salah satu atau lebih dari beberapa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras atau agama seperti:

- a) Membunuh anggota kelompok
- b) Menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok
- c) Sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruhnya atau sebagian
- d) Memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam suatu kelompok
- e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.⁸

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes against Humanity*)

Menurut pasal 7 ICC kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu atau lebih dari beberapa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas yang langsung ditujukan terhadap penduduk sipil seperti:

- a) Pembunuhan
- b) Pemusnahan
- c) Perbudakan

⁸ I Gede Widhiana Suarda, Hukum Pidana Internasional sebuah pengantar hal 166-167

- d) Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa
- e) Pengurungan atau pencabutan kemerdekaan fisik secara sewenang-wenang dan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional
- f) Penyiksaan
- g) Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, kehamilan secara paksa, sterilisasi secara paksa, atau berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya
- h) Penindasan terhadap suatu kelompok yang dikenal atau terhadap suatu kelompok politik, ras, bangsa,etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 3 atau kelompok-kelompok lainnya, yang secara universal tidak diperbolehkan dalam hukum internasional sehubungan dengan perbuatan yang diatur dalam ayat ini atau kejahatan dalam yurisdiksi mahkamah
- i) Penghilangan orang secara paksa
- j) Kejahatan rasial/ apartheid
- k) Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang serupa, yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadap tubuh, mental atau kesehatan fisik seseorang.⁹

⁹ Ibid hal 178-180

3. Kejahatan Perang (*Crimes of war*)

Menurut pasal 8 ICC kejahatan perang adalah tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari rencana atau kebijakan atau bagian dari skala besar perintah untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut ICC kejahatan perang adalah pelanggaran-pelanggaran berat terhadap konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, yaitu perbuatan-perbuatan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dari konvensi yang relevan:

- a) Pelanggaran-pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dalam kerangka hukum internasional
- b) Pelanggaran-pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang berlaku bagi keempat konvensi Jenewa dalam sengketa bersenjata yang bukan bersifat internasional.

4. Agresi (*Agression*)

Sepanjang yang menyangkut kejahatan agresi, belum ada kesepakatan mengenai definisinya atau kejahatan-kejahatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai agresi, mengingat tidak cukupnya waktu untuk membahas selama berlangsungnya konferensi di Roma. Lagipula tidak mudah dari segi hukum internasional untuk mendefinisikan tindakan apa sebenarnya yang termasuk dalam definisi agresi tersebut. Sungguh sulit membuat definisi tentang agresi yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, kejahatan agresi ini hanya akan dapat ditangani oleh

malICC apabila majelis negara-negara *pihak (The Asseby of states parties)* telah mencapai kesepakatan mengenai definisi, unsur –unsur dan kondisi dari agresi itu sendiri. Namun, mengenai keberadaan tindakan agresi ini kita dapat merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam babVII Puiagam PBB yang berjudul Tindakan yang berhubungan dengan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian,dan tindakan-tindakan agresi. Khusus swesuai pasal 39, dewan keaanan PBB dapat menentukan ada atau tidaknya ancaman terhadap perdamaian dan membuat rekomendasi atau menentukan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk memelihara dan memulihkanperdamaian dan keamanan internasional. Sehuibungan dengan itu statuta dalam pasal5 ayat 2 menyatakan bahwa ketentuanuntuk memberlakukan yurisdiksi mahkamah terhadap suatu tindak pidana agresi ini harus sesuai dengan ketentuanyang etrdapat dalam piagam PBB.

D. Konflik Bersenjata Non-Internasional

Pasal 3 Konvensi Jenewa menggunakan istilah ‘Sengketa Bersenjata yang tidak bersifat Internasional’ (*Armed Conflict not of an International character*) untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional.

Sayang sekali Pasal 3 Konvensi Jenewa sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan ‘*Armed Conflict not of*

an International character' tersebut, sehingga hal ini menimbulkan penafsiran yang sangat luas.

Oleh karena tidak terdapat suatu definisi baku secara yuridis, maka sebagai pedoman agar penafsiran kita terhadap maksud frasa tersebut tidak terlalu jauh menyimpang, kita harus melihat apa yang dimaksudkan dengan 'konflik yang tidak bersifat internasional' ini pada *Commentary* atau komentar Konvensi Jenewa. Komentar ini merupakan hasil rangkuman dari hasil-hasil persidangan dan pendapat para ahli yang terjadi pada saat pembentukan Konferensi Diplomatik yang menghasilkan Konvensi Jenewa 1949.

Komentar Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa :
"Disepakati oleh para peserta Konferensi bahwa keinginan untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan 'sengketa bersenjata' (*armed conflict*), dibatalkan. Sebaliknya disetujui adanya usulan yang berisi syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar Konvensi Jenewa dapat diterapkan dalam suatu konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Walaupun usul ini tidak diterima secara resmi (karenanya tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri di dalam Konvensi Jenewa), namun kiranya bermanfaat untuk diperkirakan dalam keadaan bagaimana Konvensi Jenewa akan berlaku.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pihak pemberontak memiliki kekuatan militer yang terorganisir, di pimpin oleh seorang Komandan yang

bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa.

- b. Bahwa Pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan pasukan reguler (angkatan bersenjata) untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan yang telah menguasai sebagian wilayah nasional;
- c. Adapun Pemerintah *de jure* tempat di mana pemberontak tersebut berada : a). telah mengakui pemberontak sebagai belligerent; b). telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai belligerent; c). telah mengakui pemberontak sebagai belligerent hanya untuk keperluan Konvensi Jenewa ini saja; dan d). bahwa pertikaian tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi;
- d. Adapun pihak pemberontak telah terorganisir sedemikian rupa dan memiliki : a). suatu organisasi yang mempunyai sifat sebagai 'negara'; b). penguasa sipil (*civil authority*) dari pemberontak tersebut dapat melaksanakan kekuasaannya terhadap orang-orang dalam wilayah tertentu; c). Bahwa pasukan pemberontak tersebut melakukan operasi-operasi militernya di bawah kekuasaan penguasa sipil yang terorganisir tersebut;

- e. Bahwa penguasa sipil dari pihak pemberontak setuju untuk terikat pada ketentuan Konvensi”.

Atas adanya usul yang memuat syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Jean Pictet, usulan tersebut bermanfaat sebagai suatu sarana untuk membedakan suatu sengketa bersenjata dalam pengertian yang sebenarnya, dengan tindakan kekerasan bersenjata lainnya seperti tindakan para penjahat (*banditry*), atau pemberontakan yang tidak terorganisir dan tidak berlangsung lama (*unorganized and shortlived insurrection*).¹⁰

Konflik bersenjata non-internasional, konflik internal, atau perang pemberontakan, selain diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, diatur pula dalam perjanjian lainnya yaitu Protokol Tambahan II, 1977.

Hal ini dapat kita baca dalam ketentuan Pasal 1 Protokol II 1977 yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 1 ayat (1). “Protokol ini, yang mengatur dan melengkapi Pasal 3 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tanpa memodifikasi syarat-syarat penerapannya, harus diterapkan pada semua konflik bersenjata yang tidak diatur dalam Pasal 1 Protokol Tambahan I tahun 1977 dan pada semua konflik bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara peserta Protokol, antara angkatan bersenjata negara tersebut dan pasukan

¹⁰

<http://arlina100.wordpress.com/2009/01/13/pengertian-konflik-bersenjata-non-internasional-menurut-konvensi-jenewa-1949/>

pembelot atau kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir lainnya, yang memiliki pemimpin yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melaksanakan pengawasannya terhadap sebagian wilayah teritorial negara dan dapat melaksanakan operasi militer yang berlanjut dan serentak serta dapat melaksanakan Protokol ini”.

- Pasal 1 ayat (2). “Protokol ini tidak berlaku untuk situasi-situasi kekerasan dan ketegangan dalam negeri, seperti huru-hara, tindak kekerasan yang bersifat terisolir dan sporadis, serta tindak kekerasan serupa lainnya, yang bukan merupakan konflik bersenjata”.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai maksudnya, maka hal tersebut perlu dilihat pada Komentar Protokol, yaitu hasil persidangan yang diadakan pada waktu Konferensi Diplomatik menjelang pembentukan Protokol ini.

Dalam Komentar Pasal 1 Protokol II terdapat penjelasan sebagai berikut :

“Karena Protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan ‘*non-international armed conflict*’ dan mengingat bahwa konflik-konflik seperti ini sangat beraneka ragam jenisnya yang berkembang sejak tahun 1949, maka telah diusahakan untuk merumuskan ciri-ciri khusus dari konflik tersebut”.¹¹

¹¹

<http://arlina100.wordpress.com/2009/01/26/pengertian-konflik-bersenjata-non-internasional-menurut-protokol-tambahan-ii-1977/>

Mengingat bahwa sengketa bersenjata non-internasional melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang sah dan pemberontak, maka sengketa bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) di dalam wilayah suatu negara.

Namun, di samping itu, sengketa bersenjata non-internasional mungkin pula terjadi pada situasi-situasi di mana faksi-faksi bersenjata (*armed factions*) saling bermusuhan satu sama lain tanpa intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah.

Selanjutnya, di dalam Komentar tersebut dapat kita ketahui, ternyata terdapat dua macam usulan untuk merumuskan apa pengertian konflik bersenjata non-internasional. Usulan-usulan tersebut adalah sebagai berikut :

- Pertama, membentuk suatu prosedur untuk menentukan secara obyektif apakah telah terjadi suatu konflik bersenjata non-internasional;
- Kedua, mengklarifikasi konsep tentang konflik bersenjata non-internasional, misalnya menentukan sejumlah elemen material yang konkrit, sehingga bila unsur-unsur ini terpenuhi maka pemerintah yang bersangkutan tidak lagi mengingkari bahwa suatu konflik bersenjata non-internasional telah terjadi.

Menurut Komentar Protokol, tentu saja alternatif pertama, yaitu untuk membentuk suatu prosedur obyektif dalam hal menentukan apakah telah terjadi konflik bersenjata non-internasional, adalah selalu lebih sulit. Oleh karena itu alternatif kedua yang lebih dipilih oleh para peserta Konferensi Diplomatik, yaitu untuk menentukan suatu formulasi definisi. Ini mengingat bahwa Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 seringkali diingkari dan tidak diakui karena tidak adanya suatu definisi tentang konflik bersenjata non-internasional.

Banyak usulan yang diajukan sehubungan dengan alternatif kedua, di mana akhirnya terdapat tiga perhatian yang harus dibahas oleh peserta Konferensi; yaitu :

- menentukan ambang batas tertinggi dan terendah dari konflik bersenjata non-internasional;
- menentukan unsur-unsur konflik bersenjata non-internasional;
- menjamin bahwa penerapan pasal 3 tetap berlaku.

Yang dimaksud dengan hal tersebut di atas menurut Komentar Protokol adalah sebagai berikut :

- Ambang batas tertinggi dan terendah konflik bersenjata non-internasional. Ambang batas tertinggi ditentukan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949. Usulan ini kemudian dilengkapi dengan mengacu pula kepada Pasal 1 Protokol I, 1977. Hal ini kiranya telah jelas, karena ke dua ketentuan tersebut mengatur mengenai konflik bersenjata

internasional. Jadi, suatu konflik internal, intensitas konflik dan unsur-unsur lainnya, harus berada di bawah intensitas konflik bersenjata internasional. Ambang batas terendah adalah situasi-situasi sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) dari Protokol II, yaitu situasi-situasi kekerasan dan ketegangan dalam negeri, seperti huru-hara, tindak kekerasan yang bersifat terisolir dan sporadis, serta tindak kekerasan serupa lainnya.

- Menentukan unsur-unsur konflik bersenjata non-internasional. Pada awalnya, *ICRC* mengajukan suatu definisi yang luas mengenai kriteria substansi yang dimaksud dengan konflik bersenjata non-internasional ; yaitu adanya suatu konfrontasi antara angkatan bersenjata atau kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir yang dipimpin oleh komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, yang mana kelompok tersebut harus memiliki dengan derajat minimum sebagai suatu organisasi. Namun usulan ini sulit diterima secara konsensus. Oleh karena itu terdapat sejumlah usulan-usulan lain, dan akhirnya ada tiga kriteria yang dapat diterima oleh para pihak yang berunding untuk menentukan unsur-unsur adanya suatu gerakan pemberontakan, yaitu :

1. Adanya komando yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya;

2. Kelompok bersenjata yang terorganisir tersebut dapat melakukan pengawasan terhadap sebagian wilayah nasional sehingga memungkinkan mereka melakukan operasi militer secara berlanjut dan serentak;
3. Kelompok bersenjata tersebut mampu untuk melaksanakan Protokol.

Adanya persyaratan tersebut membatasi berlakunya Protokol terhadap suatu konflik non-internasional pada suatu intensitas tertentu. Ini berarti tidak semua kasus konflik bersenjata non-internasional diatur oleh Protokol II. Protokol II ini hanya mengatur konflik bersenjata non-internasional dengan persyaratan tersebut di atas; dan tidak termasuk konflik bersenjata non-internasional seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Dengan perkataan lain, syarat yang diminta menurut Protokol II adalah lebih tinggi; tidak seperti Pasal 3 Konvensi Jenewa yang bersifat umum.

Dengan demikian pada hakekatnya pada setiap konflik bersenjata non-internasional, maka Pasal 3 Konvensi Jenewa dapat diberlakukan; akan tetapi untuk memberlakukan Protokol II diperlukan sejumlah persyaratan pada kelompok-kelompok perlawanan bersenjata sebagaimana dijelaskan di atas. Atau kemungkinan lain, Protokol II tersebut telah diratifikasi oleh negara yang bersangkutan.

E. *International Criminal Court (ICC)*

Pada tahun 1989, Trinidad dan Tobago mengajukan rancangan proposal pembentukan ICC di forum Majelis Umum PBB. Namun, gagasan tersebut tidak terlalu mendapatkan tanggapan sampai akhirnya muncul kembali tindakan-tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana internasional berat pada tahun 1990 an yang secara luas namun terpisah menyebar di Eropa, Afrika dan Asia. Pasca dibentuknya *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) , kebutuhan akan adanya ICC semakin terasa.

Pada tahun 1994, Majelis Umum PBB memutuskan untuk berusaha mewujudkan berdirinya ICC, dengan membawa rancangan statuta dari Komisi Hukum Internasional sebagai dasar. Rancangan tersebut dibahas di Komisi *Ad Hoc* yang bertemu sebanyak dua kali sepanjang tahun 1995. Setelah rancangan tersebut selesai dibahas oleh Komisi *Ad hoc*, Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusi Majelis Umum nomor 5216 (LII) yang diadopsi tahun 1996 dan 1997 membentuk *United Nations Preparatory Committee on the Establishment of International Criminal Court* (Komisi Persiapan) untuk menindaklanjuti hasil dari Komisi *Ad hoc*.

Komisi Persiapan membahas secara lebih mendalam rancangan tersebut dari tahun 1996 – 1997 dan berhasil menyelesaikan tugasnya pada bulan April 1998 berupa naskah final dan otentik tentang Statuta ICC.

Pada tanggal 15 Juni-17 Juli 1998 diselenggarakan konferensi diplomatik di Roma yang dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara di dunia, utusan-utusan dari organisasi-organisasi antar pemerintah (*inter-governmental organizations*) dan non pemerintah (*non-governmental organizations*) untuk membahas naskah statuta ICC yang disiapkan oleh Majelis Umum PBB sebagaimana disebutkan di atas.

Pada tanggal 17 Juli 1998, dalam konferensi tersebut telah ditetapkan pembentukan ICC yang disahkan melalui pemungutan suara. Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut, 120 negara mendukung, 7 negara menentang dan 21 negara abstain. 7 negara yang menentang tersebut adalah Amerika, Cina, Irak, Israel, Yaman, Qatar dan Libya, sedangkan 21 negara abstain pada umumnya adalah negara-negara Arab dan negara-negara Islam serta beberapa yang lainnya dari negara-negara Karibia.

Dari 120 negara yang mendukung, sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010 tercatat 114 negara telah meratifikasi statuta tersebut dengan sebaran, 31 negara Afrika, 15 negara Asia, 25 negara Amerika Latin dan Karibia, 18 dari Eropa Timur dan 25 dari Eropa Barat dan negara-negara lainnya. Senegal adalah negara pertama yang meratifikasi Statuta Roma 1998, yaitu pada tanggal 2 Februari 1999 dan diikuti oleh Trinidad & Tobago dua bulan berikutnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 126 Statuta Roma 1998, bahwa Statuta Roma mulai berlaku (*entry into force*) setelah diratifikasi

oleh 60 negara. Pada bulan April 2002, jumlah ratifikasi tercapai, dan dengan demikian, sejak tahun 2002, Statuta Roma 1998 dinyatakan berlaku, dan ICC mulai berdiri. Jumlah negara peratifikasi mencapai 60 tepatnya pada tanggal 11 April 2002, karena beberapa negara (10 negara) berencana untuk meratifikasi pada saat yang bersamaan.

Secara umum, yurisdiksi teritorial ICC berlaku di negara-negara peratifikasi Statuta Roma 1998, namun dalam aturan-aturan berikutnya dan penerapannya kelak tidak sesederhana itu. Berbicara tentang yurisdiksi teritorial dalam ICC merupakan salah satu hal yang rumit. Rumit dikarenakan tidak semua negara meratifikasi Statuta Roma 1998, sehingga tidak semua negara mengakui yurisdiksi yang dimiliki oleh ICC tersebut. Yurisdiksi teritorial ini dibahas dalam Statuta Roma 1998 mulai dari Pasal 12 sampai dengan Pasal 15.

- Yurisdiksi teritorial ICC untuk yang pertama adalah di negara-negara pihak ICC (Lihat Pasal 12 ayat (1) Statuta Roma);
- Di dalam suatu wilayah negara atau di atas kapal laut atau pesawat terbang yang didaftarkan di negara tersebut, dan negara tersebut adalah negara pihak dalam Statuta Roma 1998 atau telah menerima yurisdiksi ICC (Lihat Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma);
- Negara pihak yang melaporkan kepada penuntut umum;
- Penuntut umum dengan inisiatif sendiri berdasarkan informasi yang diterima untuk melakukan penyelidikan secara *proprio*

motu terhadap perbuatan-perbuatan yang diduga tindak pidana dalam yurisdiksi ICC.

- ICC berlaku di negara pihak atau di negara-negara sebagaimana dijelaskan dalam bagian yurisdiksi teritorial terhadap kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi materiil ICC, yang dilakukan setelah tanggal 1 Juli 2002;
- ICC dinyatakan berlaku bagi negara tersebut setelah hari pertama dalam bulan setelah hari ke enam puluh penyimpanan berkas ratifikasi negara tersebut (Lihat Pasal 126 ayat (2) Statuta Roma)

Sebagaimana telah dianut oleh peradilan pidana internasional terdahulu, maka di dalam ICC ini juga menganut prinsip pertanggungjawaban individu. Di bagian awal Statuta Roma 1998, dalam Pasal 1 sudah tegas dinyatakan bahwa, *“An International Criminal Court (‘the Court’) is hereby established. It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in this Statute, ...”*

ICC memiliki yurisdiksi material terhadap empat jenis tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 5 – Pasal 8 Statuta Roma 1998. Menurut Pasal 5 Statuta Roma 1998, Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC antara lain:

- Genosida, dijabarkan dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998;

- Kejahatan terhadap kemanusiaan, dijabarkan dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998;
- Kejahatan perang, dijabarkan dalam Pasal 8 Statuta Roma 1998;
- Kejahatan agresi.

Di ICC berlakubeberapaprinsipatauasashukumantara lain:

- Prinsip *complementary and admissability*(Pasal 1)
- Yurisdiksi universal;
- *Ne bis in idem* (Pasal 20);
- Legalitas (Pasal 22);
- Non retroaktif (Pasal 24);
- Pertanggungjawaban individu (Pasal 1);
- Non impunitas (Pasal 27);
- Pertanggungjawaban komando (Pasal 28);
- Tanpa daluwarsa perkara (Pasal 29);
- *In presentia* (Pasal 63)

Sebagai subjek hukum internasional, ICC bukanlah sebagai lembaga yang berada di bawah organ PBB, walaupun kenyataannya, berdirinya ICC tidak lepas dari prakarsa PBB. ICC berada setara dengan PBB, terlihat dari bunyi Pasal 2 Statuta Roma 1998 yang menyatakan:

“The Court shall be brought into relationship with the United Nations through an agreement to be approved by the Assembly of States Parties to this Statute and thereafter concluded by the President of the Court on its behalf”

Menurut Pasal 36 Statuta Roma 1998, hakim ICC berjumlah 18 (delapan belas) hakim yang dipilih untuk masa jabatan 9 tahun oleh Negara-negara pihak Statuta Roma 1998. hakim-hakim tersebut harus merupakan warga Negara dari Negara-negara pihak Statuta Roma 1998, dan tidak ada 2 (dua) hakim dari satu warga Negara yang sama. Hakim-hakim tersebut setidaknya menguasai salah satu dari dua bahasa kerja yang digunakan di ICC.

Penuntut umum hanya berjumlah satu orang yang mengepalai sebuah kantor penuntut umum (*the office of the prosecutor*).

Dalam melaksanakan tugasnya, penuntut umum dibantu oleh seorang atau lebih wakil penuntut umum (*deputy prosecutor*) yang bertugas melaksanakan tugas penuntut umum berdasarkan Statuta Roma 1998. Penuntut umum dan wakil penuntut umum dipilih oleh Majelis Negara Pihak untuk masa jabatan 9 (sembilan) tahun dan tidak dapat dipilih kembali sebagai diamanatkan oleh Pasal 42 ayat (4) Statuta Roma 1998.

Layaknya peradilan pidana pada umumnya, ICC juga dilengkapi oleh lembaga selain hakim dan jaksa, yaitu Staf ICC yang bertugas mengurus segala operasional dan administratif ICC, termasuk kepaniteraan. Panitera inilah yang mengepalai kantor kepaniteraan (registry) dan merupakan pejabat administratif utama dari ICC, hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 43 Statuta Roma 1998.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi, penulis memilih 2 tempat penelitian yaitu:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin,

Dan selain itu penulis juga mencari data melalui situs-situs yang penulis anggap relevan di internet.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis bahan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, pernyataan PBB yang diperoleh langsung melalui internet, berita media massa baik cetak maupun elektronik dan situs-situs internet yang dianggap relevan.

Adapun sumber bahan yang akan jadi sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah:

- a. Buku-buku
- b. Literatur-literatur lain yang relevan

C. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (library research), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari, buku-buku, media massa, jurnal serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data-data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan.

D. Analisa Bahan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Data yang diperoleh penulis akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Suriah yang sejak hampir 2 tahun lalu sempat menarik perhatian dunia karena terjadinya konflik antara kubu pemerintahan yang dipimpin Bashar Al-Ashad dan kubu oposisi yang berusaha menuntut kebebasan bernegara dan berdemokrasi yang lebih besar, yang kemudian pada perkembangannya menyebabkan kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim pemerintah yang berkuasa.

Hal ini sungguh sangat disayangkan sebab ketika paham demokrasi makin berkembang di tanah Arab yang kemudian kerap disebut sebagai “Musim Semi Arab/ Arab Spring”, justru terjadi bersamaan dengan tragedi kemanusiaan yaitu berupa pelanggaran HAM berat, dan Negara Suriah adalah yang paling mengerikan dan terjadi begitu lama, terhitung sejak Maret 2011 hingga sekarang belum terselesaikan, sekalipun dewan keamanan PBB dan Liga Arab sudah ikut ambil peran sebagai mediator antara pihak rezim berkuasa Suriah dengan pihak oposisi.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Liga Arab telah menunjuk mantan sekretaris jendral PBB Kofi Annan sebagai utusan khusus untuk Suriah pada 24 Februari 2012. Tujuan dari usaha ini adalah untuk memediasi perundingan damai antara pemerintah Suriah dengan pihak oposisi yang mengedepankan solusi politik yang memprioritaskan

kepentingan rakyat Suriah. Namun sangat disayangkan karena setelah menjabat selama 6 bulan akhirnya Kofi Annan mengundurkan diri dari jabatan tersebut sebab merasa tak sanggup lagi sebagaimana yang diungkapkannya dalam konferensi pers di Jenewa 2 Agustus 2012:

"Pertumpahan darah berlanjut, terutama disebabkan kerasnya pendirian pemerintah Suriah, dan penolakannya melaksanakan rencana enam pokok, dan juga karena peningkatan aksi militer oleh oposisi - semuanya diperburuk dengan perpecahan di kalangan masyarakat internasional".¹²

Tugas Kofi Annan kemudian dilanjutkan oleh Lakhdar Brahimi terhitung sejak 16 Agustus 2012 hingga sekarang. Pergantian utusan ini pun belum membawa perubahan dan terkesan sama saja, ini terbukti dengan masih tetap berlangsungnya konflik dan belum tampak perubahan ke arah yang diinginkan. Untuk lebih memahami persoalan ini, perlu analisis mendalam dari aspek hukum agar bisa didapatkan sebuah gambaran jelas mengenai persoalan ini.

A. Tinjauan Hukum Internasional terhadap Pelanggaran HAM Berat dalam Konflik di Suriah

Lebih dari satu tahun agenda penyelesaian pelanggaran HAM di Suriah tak jua kunjung tuntas. Komitmen penyelesaian pelanggaran HAM yang telah di fasilitasi oleh Dewan Keamanan PBB dan Liga Arab, tampak seakan percuma di tengah arus besar konflik berdarah yang hingga saat ini masih berlangsung.

¹²<http://internasional.kompas.com/read/2012/08/03/08515353/Kofi.Annan.Mundur.sebagai.Utusan.PBB>, diakses 8 November 2012.

Dari data yang penulis temukan melalui laporan dan berita yang membahas mengenai konflik Suriah, penulis menyimpulkan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Suriah sejak bulan Maret 2011 hingga setidaknya bulan Desember 2011, menunjukkan bahwa serangan-serangan yang secara langsung ditujukan terhadap penduduk sipil adalah serangan-serangan yang bersifat meluas dan sistematis. Tindakan-tindakan tersebut di antaranya adalah pembunuhan, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang. Perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh unit-unit khusus militer dan badan-badan intelejen di bawah kendali pimpinan/komandan masing-masing.

Fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang bersumber dari warga sipil serta anggota militer yang membelot yang penulis rangkum dari media on-line serta laporan Amnesty Internasional dan laporan Human Right Watch adalah bukti empirisnya.

Dalam Bab II laporan Amnesty Internasional yang berjudul "*Deliberate Killings*", secara detail menggambarkan betapa tidak berperikemanusiaanya tindakan-tindakan dari pasukan keamanan Suriah terhadap para warga sipil yang mereka tangkap, siksa dan bunuh.

Di kota Idlib, setidaknya 10 orang dibunuh oleh tentara keamanan Suriah pada tanggal 16 April 2011 di daerah Timur-laut dari pusat kota. Semua terbunuh ketika pertempuran antara pasukan militer dengan

pasukan oposisi, tetapi mereka yang menjadi korban kesemuanya bukan merupakan bagian dari pasukan oposisi.¹³

Di kota Sarmin, 16 orang dibunuh oleh tentara selama penyerbuan militer di Sarmin pada tanggal 22 dan 23 Maret 2012. Dari jumlah tersebut, 11 diantaranya adalah warga sipil yang tidak terlibat dalam konfrontasi bersenjata. Dan ditembak mati setelah mereka telah ditangkap. Beberapa orang lainnya telah dibunuh dengan sewenang-wenang selama serangan militer sebelumnya pada tanggal 27 Februari. Di antara mereka yang tewas adalah tiga bersaudara, Yousef, Bilal dan Talal Haj Hussein.¹⁴

Di Saraqeb, beberapa orang dilaporkan dibunuh oleh tentara selama penyerbuan militer di Saraqeb antara 24 - 28 Maret 2012. Mereka yang terbunuh di antaranya adalah Uday Mohamed Al-'Omar, seorang anak sekolah berumur 15 tahun dan Mohamed Sa'ad Barish, berumur 21 tahun seorang mahasiswa jurusan Kimia Universitas Aleppo.¹⁵

Di Taftanaz: Amnesty International menemukan bukti pembunuhan dalam skala besar oleh tentara di Taftanaz pada tanggal 3 dan 4 April 2012. Lebih dari 20 laki-laki dari anggota keluarga Ghazal, termasuk satu orang di antaranya di bawah usia 18 tahun. Enam belas dari mereka dibawa dari basement, dimana mereka berlindung bersama dengan perempuan dan anak-anak. Menurut beberapa wanita yang hadir di waktu,

¹³ Lihat :Amnesty Internasional: Deadly Reprisals hal 16

¹⁴ *Ibid.* hal 17

¹⁵ *Ibid.* hal 19 - 20

16 orang itu dibawa ke luar oleh pasukan keamanan berpakaian seragam tentara dan beberapa berpakaian preman, sore hari tanggal 3 April. Kemudian malam itu mayat mereka ditemukan di tiga tempat terpisah dekat ruang bawah tanah.¹⁶

Di Hazzano: Oposisi sudah tidak melakukan perlawanan kepada tentara, namun tentara masih tetap melakukan pelanggaran, termasuk setidaknya satu pembunuhan. Abd al-Latif Latouf, 72 tahun ayah dari 11 anak, tewas ditembak di rumahnya pada tanggal 5 April 2012.

Di kawasan Jebel Al-Zawiyah: Di Bsamas, sebuah desa kecil sebelah timur dari Ihsem, seorang wanita menceritakan bagaimana tetangganya, seorang 54 tahun ayah dari delapan (nama korban dirahasiakan), dibakar oleh tentara di dekat rumahnya pada tanggal 7 April 2012.¹⁷

Di kawasan Jebel AL-WASTANI : Pada tanggal 8 April, tentara meluncurkan serangan besar di al-Bashiriya, sebuah desa di mana demonstrasi protes telah berlangsung secara rutin sejak awal pemberontakan. Bersenjata kontak senjata antara tentara dan pejuang oposisi bersenjata terjadi di perbukitan di luar desa. Sekitar 35 orang tewas di sekitar desa selama bentrokan; beberapa di antaranya diyakini sebagai pejuang bersenjata, sementara yang lain mungkin pejuang tetapi sudah tidak bersenjata ketika mereka dibunuh. Beberapa adalah warga sipil, termasuk sedikitnya tiga anak, yang tidak terlibat dalam konflik dan

¹⁶ Ibid hal 21

¹⁷ Ibid hal 24

mencoba melarikan diri ke tempat yang aman. Tiga anak laki-laki : Juma'a Yousef al-'Issa 8 tahun, saudaranya Ibrahim, 14 tahun, dan sepupunya Nouredine 'Ali al-' Issa, 11 tahun dan saudara yang terakhir, 'Izzeddeen, 21, tewas di desa Biftamoun, di mana mereka menggembalakan domba milik keluarga. Anak-anak lain yang menggembala domba tidak jauh dan yang bersembunyi ketika tentara mendekat menggambarkan bagaimana tentara memaksa Izzeddeen serta tiga anak laki-laki dan untuk berlutut di tanah dan menembak mati mereka.¹⁸

Di Aleppo: Angkatan bersenjata dengan sewenang-wenang melakukan serangkaian pembunuhan dan tindakan kekerasan lainnya terhadap warga sipil yang tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Di kota kecil Tell Rif'at, di sebelah utara Aleppo, setidaknya sembilan laki-laki dan seorang anak yang terbunuh pada tanggal 9 April 2012 selama serangan dengan kekuatan militer skala besar selama satu hari penuh di kota itu.¹⁹

Serangkaian tindakan di atas adalah sebagian bukti empiris bahwa serangan yang ditujukan langsung oleh pasukan militer Suriah terhadap warga sipil benar-benar memenuhi unsur “meluas” baik dari segi lokasi maupun jumlah korban.

Dari 63 pembelot yang diwawancarai oleh *Human Rights Watch* mengatakan bahwa mereka diberi komando untuk menekan,

¹⁸ Ibid hal 30

¹⁹ Ibid hal 31

menghentikan, atau membubarkan pengunjuk rasa dengan cara apapun sebelum penempatan di lapangan.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa unsur “sistematis” juga terpenuhi, karena komando berasal dari tingkatan komandan tinggi sampai ke tingkatan komandan rendah dan terimplementasi dalam serangkaian tindakan eksekusi oleh pasukan di lapangan. Sebagian bukti menunjukkan keterkaitan dengan Presiden Bashar al-Assad, yang merupakan panglima tertinggi dari angkatan bersenjata Suriah, dan rekan dekatnya, termasuk kepala badan intelijen dan pimpinan militer. *Human Rights Watch* dalam laporannya telah mengumpulkan informasi tambahan yang menunjukkan pengetahuan langsung dan keterlibatan presiden, kepala badan intelejen dan petinggi militer dalam tindakan kekerasan dan pembunuhan warga sipil. Adapun bukti-bukti empirisnya antara lain sebagai berikut:

Ahmed, seorang tentara pengawal Presiden, yang ditugaskan ke Douma pada bulan April, mengatakan bahwa: “Brigjen Talal Makhlof, komandan Brigade 105, Pengawal presiden, memberi unitnya perintah lisan untuk “menekan pengunjuk rasa dan menembaknya jika menolak untuk bubar”.²¹

Jamal, seorang anggota dari brigade 105 mengatakan: “pada tanggal 27 Agustus kami berada di dekat sebuah rumah sakit polisi di Harasta. sekitar 1.500 pengunjuk rasa datang ke sana. Mereka meminta pembebasan seorang pengunjuk rasa terluka yang berada di dalam

²⁰ Laporan Human Right Watch, Desember 2011 hal 29

²¹ Ibid hal 32

rumah sakit. Mereka memegang cabang zaitun. Mereka tidak punya senjata. Ada 35 tentara dan sekitar 50 personel mukhabarat di pos pemeriksaan. Kami juga memiliki sebuah jip dengan senapan mesin-mount. Ketika pengunjung rasa yang kurang dari 100 meter jauhnya, kami melepaskan tembakan. Kami sebelumnya menerima perintah untuk melakukannya dari Brigadir Jenderal. Lima pengunjung rasa terkena, dan saya yakin dua dari mereka mati”.²²

Abdullah, seorang tentara dari Batalyon 409, 154 Resimen, dan Divisi ke-4 Dia mengatakan bahwa dua komandan tingkat tinggi memberikan perintah lisan kepada pasukan untuk menembak para demonstran: Kami diberitahu untuk menembak jika warga sipil berkumpul dalam kelompok lebih dari tujuh atau delapan orang. Komandan Brigadir Jenderal Resimen 154 Jawbat Ibrahim Safi dan komandan divisi Mayor Jenderal Mohamed Ali Durgham memberi kami perintah sebelum kami pergi keluar. Perintah adalah untuk menembak pada pertemuan pengunjung rasa serta pembelot, dan rumah-rumah badai dan penangkapan orang yang sewenang-wenang.²³

"Najib," yang ditempatkan di Daraa dengan Batalyon 287, 132nd Brigade, Divisi 5, mengatakan bahwa komandan brigade mengkomunikasikan perintah secara lisan kepada pasukan sebelum operasi militer besar pada tanggal 25 April, untuk menggunakan kekuatan mematikan terhadap demonstran. Dia mengatakan: “Brigadir Jenderal

²² Ibid hal 32

²³ Ibid hal 30

Ahmed Yousef Jarad, komandan brigade, mengumpulkan kami di halaman sebelum kami ditugaskan. Dia mengatakan kepada kami untuk menghentikan kerusuhan dengan segala cara yang diperlukan. Dia mengatakan bahwa negara perlu dibersihkan dari para pengunjung rasa dan mengatakan kita harus menembak yang mencurigakan. Dia memerintahkan kami untuk menggunakan senapan mesin PKT dan senjata antipesawat DShK (mobil tank buatan Rusia) juga. Perintah umum kami adalah untuk membunuh, menghancurkan toko, menghancurkan mobil di jalanan, dan menangkap orang-orang.²⁴

"Mohamed," seorang tentara dikerahkan dengan unit pertahanan udara MD 1010 ke Bukamal pada awal Mei, mengatakan bahwa komandan unitnya, Kolonel Issa Shibani menjelaskan pada unitnya bahwa, tugasnya bukan untuk menangkap orang, tetapi untuk membunuh, komandan mereka memberikan perintah lisan untuk "membunuh siapa pun resisten, terlepas dari apakah mereka adalah laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Mohamed mengatakan bahwa 35 sampai 40 orang yang tewas selama hari pertama operasi ketika unitnya masuk Bukamal.²⁵

Ameen, seorang penembak jitu, ditugaskan bersama dengan Pasukan Khusus ke Homs pada awal Mei, juga mengatakan bahwa dia diberi perintah lisan kadang-kadang juga perintah tertulis. Menurut Ameen, Kolonel Faisal Bya'i, komandan Batalyon Pasukan Khusus 625, memberikan perintah lisan "untuk membunuh atau membunuh" (

²⁴ Ibid hal 30-31

²⁵ Ibid hal 32

membunuh para demonstran atau membunuh pembelot yang tidak menaati perintah).²⁶

Said, seorang tentara pada Batalyon 990, 134 Brigade, Divisi ke-18, yang ikut serta dalam operasi di Talbiseh pada bulan Mei, mengatakan bahwa Brigadir Jenderal Yousef Ismail, Komandan Brigade 134, berdiri memberi mereka perintah, dan Kolonel Fo'ad Khaddour juga sering memberi mereka perintah langsung. Dia mengatakan bahwa pada awal Mei, Khaddour dan Ismail memberikan perintah lisan untuk membakar rumah dan orang-orang (yang bersembunyi) di atap saat pemakaman beberapa demonstran yang tewas hari sebelumnya di Talbiseh.²⁷

Osama, yang bertugas di Resimen Udara 555, Divisi 4, mengatakan bahwa Brigadir Jenderal Jamal Yunes, komandan Resimen 555, memberi mereka perintah lisan untuk menembak demonstran selama penugasan mereka ke Mo`adamiyeh, Damaskus. Osama mengatakan bahwa ia kemudian mengetahui bahwa perintah datang dari Maher al-Assad, komandan de facto dari Divisi 4 dan merupakan adik Presiden al-Assad.

Amjad, yang dikirim ke Daraa dengan Resimen Pasukan Khusus 35, mengatakan bahwa ia menerima perintah lisan langsung dari komandannya untuk melepaskan tembakan pada demonstran pada 25 April. Dia mengatakan: Komandan resimen kami, Brigadir Jenderal Ramadhan Mahmoud Ramadhan, yang biasanya berada di garis

²⁶ Loc cit

²⁷ Ibid hal 33

belakang, tapi kali ini ia berdiri di depan dari brigade keseluruhan. Dia berkata, "Gunakan senjata berat, tak seorang pun akan meminta kalian untuk menjelaskannya, karena biasanya kita menyimpan peluru, tapi kali ini ia mengatakan, gunakan peluru sebanyak yang kalian inginkan. Dan ketika seseorang bertanya apa yang kita seharusnya tembak, katakan padanya apa pun di depan kalian. Amjad mengatakan sekitar 40 pengunjuk rasa tewas hari itu.²⁸

Dalam konflik Suriah ada bukti lain yang memberikan informasi bahwa komandan satuan tidak hanya memerintahkan pembunuhan tetapi juga turun tangan langsung membunuh masyarakat sipil. Seperti yang dikatakan oleh Afif, seorang pegawai karir yang melayani Pengawal Presiden dan ikut serta dalam unjuk rasa di Nawa, mengatakan bahwa kekuatan baru kelompok militer diturunkan termasuk Batalyon 171 Brigade 112, ketika protes dimulai kembali di kota pada awal Agustus. Afif mengatakan ia melihat, Kolonel Ali Abdulkarim Sami, membakar pengunjuk rasa dari Kalashnikov dan membunuh satu orang berumur 16 tahun Omran Riad Salman. Human Rights Watch terakhir rekaman diposting di YouTube yang dimaksudkan untuk menunjukkan tubuh seorang pemuda yang kemudian diidentifikasi sebagai Omran Riad Salman yang terbunuh pada 3 Agustus di Nawa.²⁹ Rangkaian tindakan pasukan keamanan dan militer Suriah di atas jelas dan pasti tidak dapat diterima oleh akal sehat dan nurani kemanusiaan.

²⁸ Ibid hal 37

²⁹ Ibid hal 38

Penganiayaan sistematis dilakukan tentara Suriah terhadap warga sipil di Homs, termasuk menyiksa dan membunuh. Ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan," tegas HRW dalam pernyataannya. HRW mengatakan, tentara Suriah telah menewaskan sedikitnya 104 orang di Homs sejak 2 November lalu. Padahal, saat itu Pemerintah Suriah yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad seharusnya sudah menghentikan aksi kekerasan itu, sesuai proposal Liga Arab yang telah disepakatinya.³⁰

Pasukan Keamanan Suriah menyerbu sebuah Asrama Mahasiswa Universitas Aleppo, pada hari Kamis 3 Mei 2012. Dalam serangan tersebut, sedikitnya empat orang mahasiswa tewas. Pihak militer juga memaksa agar universitas negeri tersebut ditutup. Pengepungan asrama tersebut dimulai sejak Rabu malam tanggal 2 Mei waktu setempat. Pengepungan itu terjadi setelah 1.500 mahasiswa menggelar aksi protes terhadap rezim Presiden Bashar Al Assad.³¹

Beberapa fakta yang dipaparkan diatas memberikan kesimpulan bahwa kesemua tindakan itu adalah tergolong sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Dalam hukum internasional Kejahatan terhadap Kemanusiaan merupakan salah satu jenis/bentuk pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ICC.³²

³⁰ http://m.koran-jakarta.com/?id=75899&mode_beritadetail=1 diakses Kamis 29 November 2012 pukul 01:11 Wita

³¹ <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/05/04/m3hbmw-militer-suriah-serang-asrama-mahasiswa-empat-tewas> diakses Kamis 29 November 2012 pukul 01: 20 Wita

³² Lihat Pasal 7 ICC.

Menurut Hukum Internasional HAM berlaku baik dalam situasi damai maupun situasi konflik sehingga secara hukum memiliki kekuatan mengikat terhadap negara termasuk Angkatan Militernya. Suriah terikat secara hukum pada ketentuan hukum internasional ini, sebab Suriah merupakan negara pihak dari beberapa konvensi HAM Internasional diantaranya Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, *the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*; *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*; *the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*; and *the Convention on the Rights of the Child (CRC) and its Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict*, dan bahwa Suriah sebagai bagian dari masyarakat internasional seharusnya ikut serta dalam pengkampanyean, perlindungan dan penegakan HAM. Hal ini menurut penulis bahwa sudah seharusnya kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang dipaparkan diatas dibawa ke *International Criminal Court (ICC)* untuk diadili sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Mekanisme untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat dalam konflik di Suriah

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ ICC) didirikan berdasarkan Statuta Roma yang diadopsi pada tanggal 17 Juli 1998 oleh 120 negara.

Tujuan dari pendirian ICC adalah untuk mengadili pelaku Pelanggaran HAM berat, adapun jenis-jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC adalah: Kejahatan Genosida (*Crimes of Genocide*), Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*), Kejahatan Perang (*Crimes of War*) dan Agresi (*Agression*).

ICC merupakan mahkamah yang independen dan bukan merupakan badan dari PBB, meskipun dalam kondisi tertentu memiliki hubungan peran³³. Atas dasar inilah pelaku pelanggaran HAM berat dalam konflik Suriah dapat diadili di ICC.

Penekanan dari ICC adalah untuk mengadili individu baik sebagai bagian dari sebuah rezim maupun sebagai bagian dari gerakan pemberontakan, sehingga kegagalan masyarakat internasional untuk mengadili pelaku Pelanggaran HAM berat dan tidak ada lagi pelaku yang yang tidak dihukum tidak terulang kembali. Akan tetapi dalam kasus ini, Suriah belum meratifikasi Statuta Roma sehingga ini menjadi masalah. Akan tetapi tampaknya para perancang Statuta Roma sudah sejak awal menyadari akan timbulnya masalah seperti ini, sehingga secara tegas menurut pasal 13 huruf b Statuta Roma telah diatur bahwa, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa DK PBB berdasarkan kewenangannya menurut Bab VII Piagam PBB, berhak untuk menyerahkan kepada Mahkamah melalui Jaksa Penuntut atas kejahatan yang terjadi di wilayah yang belum atau tidak meratifikasi Statuta.³⁴

³³ Lihat pasal 2 ICC

³⁴ Lihat pasal 13 huruf b ICC

Namun penyerahan ini hanya dapat dilakukan apabila DK PBB terlebih dahulu bersidang untuk membahas masalah yang terjadi dalam wilayah Negara-negara yang tidak menjadi peserta statuta, yang menurut DK PBB merupakan ancaman atas keamanan dan perdamaian dunia. Selanjutnya diakhiri dengan pengambilan keputusan yang dituangkan dalam sebuah resolusi untuk menyerahkan kasus tersebut kepada jaksa penuntut untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan statuta.³⁵

Menurut penulis pasal 13 huruf b ICC merupakan landasan yuridis yang kuat dan legal untuk melegitimasi DK PBB dalam mengambil kebijakan untuk menyerahkan kasus pelanggaran HAM berat dalam konflik Suriah ke ICC. Adapun landasan yuridis lain adalah bahwa Suriah merupakan Negara Pihak (*State Party*) dari beberapa konvensi HAM internasional berdasarkan asas hukum *Pacta Sun Servanda*. Sehingga dengan demikian, maka secara teoritis terjadinya impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM berat tidak ada lagi.

Penulis sepenuhnya percaya dan yakin bahwa inilah cara yang paling baik yang dapat ditempuh untuk mengadili para Penjahat Kemanusiaan dalam konflik Suriah, seperti halnya kebijakan yang diambil pada tanggal 31 Maret 2005 DK PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1593 untuk menyerahkan situasi di kota Darfur, Sudan, kepada jaksa penuntut ICC. Sehingga pada tanggal 6 Juni 2005 jaksa penuntut ICC Luis Moreno Ocampo secara resmi membuka penyelidikan atas kejahatan-kejahatan

³⁵ Solihin Bone, skripsi hal 75-76

yang terjadi di Darfur. Setelah melalui serangkaian koordinasi dengan DK PBB akhirnya pada tanggal 27 Februari 2007 jaksa penuntut ICC menyerahkan kepada Kamar Pra Peradilan (*Pre Trial Chamber*) I yang dipimpin oleh majelis hakim: Akua Kuenyehia, Anta Uchaka dan Sylvia Steiner. Surat panggilan terhadap Ahmad Harun (mantan Menteri Dalam Negeri Sudan) dan Ali Muhammad Ali Abdal-Rahman (pemimpin milisi yang juga dikenal dengan nama Ali Kushyab), untuk menghadiri pemeriksaan awal di ICC. Pada tanggal 2 Mei 2007 majelis hakim PTC I mengeluarkan surat perintah penangkapan atas Ahmad Harun dan Ali Kushyab. Selanjutnya Jaksa Luis Moreno Ocampo pada tanggal 14 Juli 2008 meminta kepada PTC I untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Omar Hassan Ahmad Al-Bashir.³⁶

³⁶ Ibid hal 78-83

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam konflik Suriah telah terjadi Pelanggaran HAM berat (Gross Violation of Human Rights) yang dalam hal ini adalah Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity) sebagaimana diatur dalam pasal 7 ICC.
2. Bahwa para pelaku Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam konflik Suriah, wajib diadili berdasar ketuntuan hukum internasional yang dalam hal ini adalah ICC.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah paparkan sebelumnya penulius merasa perlu untuk memberikan saran untuk kelengkapan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Oleh karena serangkaian tindakan pasukan keamanan dan intelejen dalam konflik Suriah yang kemudian dikategorikan sebagai Kejahatan terhadap kemanusiaan bersifat sistematis dan meluas, baik dari segi korban dan tempatnya maka penulis

menyarankan kepada PBB untuk menugaskan beberapa orang pemantau di Suriah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Human Right Watch dan Amnesty Internasional.

2. Bahwa berhubung karena Suriah bukan merupakan Negara Pihak (State Party) dalam ICC maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations Security Council) wajib untuk mengeluarkan satu Resolusi untuk menyerahkan Pengajuan para pelaku kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam konflik Suriah ke ICC oleh Jaksa Penuntut (The Prosecutor) ICC.
3. Agar seluruh Negara anggota PBB mendesak DK PBB untuk secepatnya mengambil keputusan sebagaimana dimaksud oleh poin 2 di atas.
4. Agar PBB dan Liga Arab mengintensifkan komunikasi guna percepatan penyelesaian konflik di Suriah.

DAFTAR PUSTAKA

Buyung Nasution, Adnan, A. Patra M. Zen. 2006. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Davidson, Scott. 1994. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni.

Wayan Parthiana, I. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya.

_____, I. 2003. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya.

<http://arlina100.wordpress.com/2009/01/13/pengertian-konflik-bersenjata-non-internasional-menurut-konvensi-jenewa-1949/>

<http://arlina100.wordpress.com/2009/01/26/pengertian-konflik-bersenjata-non-internasional-menurut-protokol-tambahan-ii-1977/>

<http://arlina100.wordpress.com/2009/01/13/pengertian-konflik-bersenjata-non-internasional-menurut-konvensi-jenewa-1949/>

<http://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/herlambang-sejarah-dan-perkembangan-ham.pdf>

<http://politik.kompasiana.com/2012/07/19/krisis-politik-di-suriyah-dan-rezim-presiden-bashar-al-assad/>